

Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara*

Nur Rohim Yunus

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v3i3.7864](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i3.7864)

Abstract:

State life, which currently uses a political structure, must have difficulties. The right that individuals have to own the means of production and property makes certain people the bourgeoisie, while others who are unable to become workers are, of course, hired by the bourgeoisie on their own lands and means of production. This is what has come to be known as bourgeois democracy. This research uses a qualitative analytical study using a bibliothèque approach. The findings of the study suggest that neoliberal democracy has an influence on the life of the country. It can be seen that in some countries the workers are marginalized and restrained. So it triggered a huge social disruption.

Keywords: Democracy; Bourgeois; Country

Abstrak:

Kehidupan bernegara yang notabene menggunakan sistem demokrasi pasti memiliki permasalahan. Kebebasan yang dimiliki warga negara untuk memiliki alat produksi dan tanah menjadikan sebagian kalangan menjadi kaum borjuis, sedang kalangan lain yang tidak mampu menjadi kaum pekerja, yang tentunya dipekerjakan oleh kaum borjuis pada tanah-tanah dan alat-alat produksi yang dimilikinya. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Borjuis. Penelitian ini menggunakan penelitian dekriptif kualitatif dengan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Demokrasi Borjuis memberikan dampak kehidupan negara. Terlihat di beberapa negara menjadikan kaum buruh sebagai pihak tertindas dan terkekang. Sehingga menimbulkan gejolak sosial yang massif.

Kata kunci: Demokrasi; Borjuis; Negara.

* Diterima tanggal naskah diterima: 15 Maret 2016, direvisi: 25 April 2016, disetujui untuk terbit: 20 Mei 2016.

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari kata *demos* (rakyat) dan *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *crates* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti apa yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan.¹

Secara umum, ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan. Mereka yang mempunyai kekayaan yang paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Mereka yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terbesar termasuk dalam lapisan teratas. Mereka yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat teratas di masyarakatnya. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan menempatkan mereka yang berilmu pengetahuan tinggi dalam lapisan teratas. Kebebasan atas segelintir para penguasa inilah yang mendominasi untuk menguasai, memonopoli, dan menghisap kebebasan untuk memperdagangkan segala sesuatu demi menumpuk kekayaan individu dan menyingkirkan mayoritas rakyat yang tertindas. Hal inilah yang disebut demokrasi borjuis.²

B. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif diartikan sebagai penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat manusia tertentu. Ciri pokok dari penelitian deskriptif adalah memusatkan

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.66.

² Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) h.35.

perhatian pada masalah-masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* artinya rakyat dan *cratein* artinya pemerintah. Secara sederhana, demokrasi berasal pemerintahan oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Diantara beberapa pengertian tentang demokrasi. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk voting dimana semua pemilih bersama-sama menentukan kebijakan publik, hukum, dan tindakan sistem yang mereka inginkan. Karena unsur utama dalam demokrasi adalah kebebasan berekspresi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers, sehingga setiap calon pemilih cukup informatif dan dapat memilih sesuatu dengan kepentingan terbaik mereka sendiri saat mereka mengambil keputusan.

Henry B. Moyo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem politik yang merupakan sebuah kebijaksanaan umum yang ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³

Sebagai sebuah kondisi ideal, demokrasi tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan. Tetapi upaya menuju demokrasi yang ideal merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut sebagai demokratisasi. Demokratisasi biasanya diawali dengan adanya liberalisasi (meluasnya kebebasan). Dalam tahap ini media massa agak diberi kelonggaran sehingga tidak menghadapi ancaman pembredelan, masyarakat cukup leluasa melakukan partisipasi sosial melalui organisasi dan wahana lain, serta mulai berkembang penghargaan terhadap keragaman (pluralisme). Selain lembaga-lembaga negara, terdapat pula lembaga politik lain seperti partai politik. Politik adalah organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang mewakili tujuan sama dan dibentuk untuk memperjuangkan tujuan melalui kekuasaan politik. Jadi partai politik terlihat dalam persaingan untuk memegang kekuasaan politik. Pada dasarnya, politik berkenaan dengan kehidupan publik, yaitu kehidupan yang berkaitan dengan orang kebanyakan atau rakyat. Masyarakat madani (civil

³ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004) h.70.

society) merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perikehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Masyarakat madani mencerminkan sifat kemampuan dua masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

2. Kedudukan Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Negara

Menurut Chinoy dalam setiap hubungan antar manusia maupun antar kelompok sosial selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.⁴

Di Indonesia, partisipasi rakyat dalam politik selalu dibatasi dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan produk parlemen yang dikuasai atau sudah dipengaruhi oleh kaum borjuisasi. Sehingga kaum borjuisasi sajalah yang bisa berpartisipasi dalam politik. Melihat komposisi kontestan partai dalam pemilu 2009 sangatlah jelas menunjukkan hegemoni kaum feodal dalam dunia politik sangatlah kuat, yaitu: PDIP, PD, GOLKAR, HANURA, GERINDRA, dan partai lainnya yang sudah sangat jelas keberpihakannya pada kaum modal. Sejak Orde Baru pemilu 1999, 2004, dan 2009 komposisi kontestannya selalu diisi oleh partai-partai yang berkepentingan pada kaum modal.

Demokrasi Borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan kelas. Demokrasi borjuis di dasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja. Sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat, bentuk demokrasi yang memuat cara pandang kelas.

Mayoritas manusia yang tidak memiliki alat produksi serta tidak menguasai modal, akan menjual tenaga dan keahliannya pada kaum modal, jadikan dia buruh. Tenaga dan keahlian para buruh digunakan oleh kaum borjuis untuk menciptakan barang (produksi) dagangan (komoditi). Dari hasil kerja tersebut, si pekerja hanya mendapatkan bagian kecil dan si pemilik modal yang tidak bekerja mendapatkan keuntungan yang besar. Cara kerja seperti itu tidak akan bertahan jika ada Undang-Undang, aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan lain sebagai pendukungnya. Subsidi sosial, pajak impor-ekspor tinggi, prodak UU, kebijakan yang tidak mendukung praktek borjuis, merupakan batu halangan yang harus segera dihilangkan, karena akan meminimalisir keuntungan.

⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) h.40.

Selama dalam masyarakat masih ada kelas-kelas, selama itu pula masih dibutuhkan sebuah alat bagi kelas yang mendominasi untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi. Dalam masyarakat kapitalis, dominasi kaum pemodal yang hidup dari kerja upahan kaum buruh sangatlah mempengaruhi proses penumpukan kekayaannya. Artinya, penguasaan Negara begitu penting dalam rangka merebut, memperkuat dominasi, menjaga agar tidak terjadi perlawanan kelas buruh/kaum yang dihisapnya. Dalam setiap perkembangan masyarakat, kelas yang mendominasi selalu menggunakan kekuasaan untuk menindas kelas lainnya. Dalam masyarakat kapitalis, penggunaan Negara untuk menindas kelas lain nampak dengan terang dan jelas.

Dalam masyarakat Eropa, ketika terjadi revolusi industri muncul stratifikasi sosial yang dibedakan menjadi kaum proletariat atau proletar dan kaum borjuis. Kaum proletariat atau proletar merupakan kelas pekerja pada abad ke-19. Kaum proletariat hidup hanya dengan menjual tenaga kerjanya dan tidak menarik keuntungan dari mana-mana. Disisi lain yang disebut dengan kaum borjuis merupakan kelas pemilik kapital atau modal yang memegang peranan penting dalam masyarakat industri ketika itu.⁵

Kaum kapitalis berpendapat bahwa kaum pemilik modal (kapital) adalah tokoh sentral dalam pembangunan ekonomi. Jika para pemilik modal dibebaskan dalam berusaha, maka usahanya itu dengan sendirinya akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Para pemilik modal pun berlomba-lomba mendirikan perusahaan, memperkerjakan masyarakat banyak, dan pada akhirnya negeri ini mengalami kemakmuran.⁶ Seperti semboyan kapitalis *"segala sesuatu untuk diri sendiri, peduli apa dengan orang lain."* Hal ini pun didukung oleh pendapat Karl Marx, dimana sistem kapitalisme di Inggris abad ke-19 yang melahirkan kisah-kisah tentang kesengsaraan hidup, yakni merupakan sistem penindasan melalui mekanisme pasar, dimana kaum pekerja terpaksa menerima upah rendah karena tidak seimbangnya antara lapangan pekerjaan dan pencari kerja, yaitu bahwa jumlah pencari kerja jauh lebih besar dibanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.⁷

3. Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan Bernegara

Dalam demokrasi model seperti ini, kekuasaan penuh berpihak pada kaum borjuis, yakni kaum kapitalis, yang sebagian besar juga para pejabat negara. Dengan kekuasaan penuh dan mematikan itulah mereka akan terus

⁵ Asnawi dan Hartutik, *"Analisis Historis Terhadap Komunis Sebagai Suatu Ideologi Politik"*, dalam jurnal seuneubok lada, v. 2, no. 1, juli-desember 2014, h.12.

⁶ Rustam Dahar KAH, *"Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, dalam jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam, v.1, Ed. 1, mei, 2010, h.18.

⁷ Rustam Dahar KAH, *"Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, dalam jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam, v.1, Ed. 1, mei, 2010, h.1.

berusaha untuk bisa menempati dan menguasai pos-pos penting. Dengan berbagai cara, mereka tidak hanya ingin memegang kendali atas ekonomi, tetapi juga ideologi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya.

Hal penting lainnya bagi kapitalis adalah bagaimana bisa mengontrol lembaga-lembaga politik formal tersebut yang sudah jelas ada dan terang di Indonesia. Para pejabat tinggi negara tak lain adalah para kapitalis. Mereka memiliki, atau paling tidak, menguasai instrumen-instrumen penting, seperti modal besar, media, jaringan, dll. Jika mereka tidak ingin secara langsung berada di pos-pos politik formal tersebut, mereka akan membayar politisi-politisi untuk mewakili mereka di pemerintahan.

Hukum yang seharusnya sebagai aturan main milik bersama, dengan jelas sangat bias kelas. Karena negara yang berada di bawah kekuatan kapitalisme, sistem hukumnya berpihak kepada kelas kapitalis. Hukumnya adalah hukum kelas.

Hal yang perlu disampaikan adalah bahwa hasil Revolusi Perancis 1789 ternyata semakin memberi ruang bagi borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Artinya Revolusi Perancis 1789 memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekankan agar negara tidak terlalu ikut campur dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya untuk berusaha. Inilah cikal-bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat.⁸

Demokrasi membantu orang-orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka. Melindungi kesempatan dan kebebasan untuk memilih, kesempatan untuk membentuk kehidupan menurut tujuan, pilihan, perasaan, nilai komitmen, dan keyakinan dengan baik dari semua sistem politik alternatif yang pernah terjadi. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Ini merupakan penegasan bahwa dibutuhkan sebuah proses untuk mengambil berbagai keputusan tentang aturan-aturan dan hukum-hukum yang memenuhi beberapa kriteria yang layak.

Dalam masyarakat feodal, Raja, tuan tanah dan kaum bangsawan, memperoleh hak istimewa atas harta, kekuasaan dan kehormatan. Pada jaman feodal, kerajaan menarik pajak tinggi pada rakyat, kaum bangsawan dan tuan tanah menyewakan tanah dengan sistim bagi hasil kepada tani tak bertanah. Gereja (baca: agama) dijadikan alat pelanggaran penindasan dengan doktrin "Raja adalah titisan Tuhan." Kehidupan mayoritas manusia ada di tangan tuan

⁸ Adji Samekto, *mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi dan Globalisasi*, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, h.306.

tanah, bangsawan dan pihak gereja, kolaborasi penindasan manusia yang terjadi pada jaman feodal.

Di sisi lain, kaum pedagang (borjuis) terus melakukan modernisasi alat-alat produksinya, seperti melakukan penemuan teknologi mesin uap, pemintal wol dan lain sebagainya. Hal ini memberi harapan pada kaum borjuis untuk terus mengembangkan produksi demi keuntungan dagang. Kemajuan para pedagang terhambat dengan perilaku sewenang-wenang, hidup berfoya-foya tanpa kerja, penarikan pajak yang tinggi yang dilakukan oleh para raja, tuan tanah, bangsawan dan pihak gereja.

Pertentangan-pertentangan dan persoalan-persoalan ini tidak terselesaikan dan tidak terdamaikan sampai meletuslah revolusi, terutama di Perancis pada tahun 1781-1791. Para tuan tanah, pihak gereja penyokong tuan tanah serta kaum bangsawan (masyarakat feodal), hancur dan digantikan oleh masyarakat Kapitalis.

Revolusi Perancis menjadi titik awal kelahiran Sistem Ekonomi-Politik Kapitalis dengan slogan dan tuntutan *Liberte, Fraternite, Egalite*. Masyarakat kapitalis masyarakat kebebasan individual dalam kepemilikan sumberdaya produksi guna menumpuk kekayaan pribadi dengan hasil kerja orang lain (kaum buruh). Kaum borjuis tidak akan bisa memperbanyak keuntungan jika kebebasan individual tidak dibuka.

Robert M. Unger menyatakan bahwa sebenarnya para ahli hukum abad ke-19 telah berusaha untuk menciptakan struktur hukum yang didasari ide demokrasi dan pasar bebas, dimana ada semacam simbiosis mutualisme antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi.⁹ Hanya pemilik modal yang berkuasa pada masa itu. Padahal demokrasi secara umum mengenal beberapa sifat dan syarat, baik secara konstitusional maupun secara prosedural. Mulai dari hal-hal asasi manusia termasuk soal persamaan, kebebasan dan keadilan. Maka dalam suatu negara demokrasi tiap warga negara mempunyai hak yang sama. Hak yang sama ini mencerminkan keadilan.¹⁰

Hasil dari Revolusi Perancis pada tahun 1789 juga memberikan ruang bagi kaum borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Artinya Revolusi Perancis 1789 memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang

⁹ Adji Samekto, *"Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi, dan Globalisasi"*, dalam jurnal *dinamika hukum*, v. 14., no. 2, Mei 2014, h.302.

¹⁰ Runi Hariantati, *"Etika Politik Dalam Negara Demokrasi"*, dalam jurnal *demokrasi*, v. II, no. 1, 2003, h.65-66.

kebebasan kepada warganya untuk berusaha. Inilah cikal bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat. George C. Lodge, dengan mengutip dari the oxford English dictionary mendefinisikan kapitalisme sebagai: “a system which favors the existence of capitalist.” Pengertian kapitalis itu sendiri menurut Lodge adalah “one who has accumulated capital or has it available for employment in other enterprises.” Dari pendefinisian ini jelas bahwa pemupukan modal merupakan ciri utama yang melekat pada sistem kapitalisme.¹¹

Selanjutnya ada tiga aliran pemikiran yang berkembang. Kelompok pertama adalah mereka yang melihat bahwa kapitalisme “bertentangan” dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa “muatan demokratis” demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan-gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukannya elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, hasil gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh equilibrium politik di mana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan otoritarianisme yang inheren dalam kekuasaan kapitalis.

Berbeda dengan pandangan pertama yang melihat demokrasi sebagai hasil perjuangan kelas dan bukan elemen integral dari ekspansi pasar sehingga hubungan kapitalis dan demokrasi lebih bersifat kontradiktif. Pandangan kedua berpendapat bahwa pertumbuhan kapitalisme dan demokrasi saling terkait. Di sini, pasar-pasar yang bebas dan pemilu yang bebas dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat, atau yang satu dianggap sebagai penciptaan prakondisi-prakondisi untuk yang lainnya; liberalisasi ekonomi yang membesarkan kekuatan-kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya liberalisasi politik dan demokrasi menciptakan kondisi bagi pembangunan ekonomi.

Menurut pemikiran ini, pasar-pasar bebas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme, dan memajukan pluralisme sosial, yang merupakan bumbu yang penting bagi demokrasi. Karena itu, sebuah sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan kondisi-kondisi kapitalisme yang dipandang sebagai bentuk paling efektif dan efisien pembangunan ekonomi. Menurut Petras dan Veltmeyer, baik pandangan kubu pertama maupun aliran pemikiran kelompok kedua, telah mendominasi perdebatan politik dan ekonomi sejak tahun 1960-an (Petras dan Veltmeyer 2002, 194). Namun, belakangan juga telah muncul aliran pemikiran ketiga yang berpendapat bahwa wacana-wacana teoritis yang berangkat dari kedua alur pemikiran di atas melupakan sentralitas “aturan main (politik)” yang mendefinisikan demokrasi yang independen yang berasal dari

¹¹ Adji Samekto, “Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi, dan Globalisasi”, dalam jurnal dinamika hukum, v. 14, no. 2, mei 2014, h.306.

gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan sosial tentang aturan main persaingan politik akan menjamin bahwa kekuatan-kekuatan politik yang bersaing akan menerima hasil-hasil pemilu dan proses demokrasi yang lain dengan asumsi pemegang kekuasaan akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankannya, sementara kelompok oposisi mempunyai peluang yang sama untuk memperebutkan kekuasaan tersebut.¹²

4. Implikasi Demokrasi Borjuis Dalam Kehidupan

Ada beberapa implikasi yang ditimbulkan dari adanya demokrasi borjuis dalam kehidupan. Diantaranya adalah:

Pertama; Kesengsaraan Rakyat Miskin

Dalam perspektif Marxis, demokrasi borjuis bisa diartikan sebagai “sebuah sistem politik di mana orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan tentu di lembaga-lembaga negara lainnya, adalah orang-orang yang berasal dari kelas borjuis”. Mereka adalah para pemilik modal besar. Mereka itulah yang selama ini mengendalikan keuangan, pabrik-pabrik dan mesin-mesin industri modern. Oleh karena itu, borjuis yang selama ini sudah berkuasa di pos-pos ekonomi, yang kemudian oleh sistem didorong untuk menempati pos-pos politik akan dapat dengan mudah mengeksploitasi buruh dan “membunuh” kehidupan jutaan rakyat miskin. Akhirnya, negara yang seharusnya menjadi “ibu” bagi seluruh rakyatnya hanya akan menjadi “tempat di mana individu-individu dari kelas yang berkuasa memaksakan kepentingannya”.

Diatas kertas, memang benar bahwa demokrasi borjuis memberikan ruang yang sama, hak-hak yang sama kepada semua kelas dan golongan. Tetapi pada prakteknya, ruang-ruang ekonomi dan politik penting hanya bisa diakses oleh kelas tertentu, yaitu kelas borjuis. Jadi jelas, tidak akan pernah ada demokrasi yang sesungguhnya di bawah kapitalisme. Sebelum sistem kapitalisme ini dihancurkan oleh kaum buruh yang terorganisir, dibantu dengan elemen-elemen progresif lainnya, maka praktek politik yang korup dan bermental *cecunguk* ini akan terus berlangsung. Sejarah kemanusiaan di bawah demokrasi borjuis akan terus menjadi sejarah terror dan ketakutan; sejarah kemiskinan dan kematian; sejarah kekalahan dan ketidakberdayaan.¹³

Hal yang perlu disampaikan pula disini adalah bahwa hasil dari Revolusi Perancis 1789 semakin memberi ruang bagi kaum borjuis untuk berperan dalam kehidupan ekonomi. Artinya Revolusi Perancis 1789 memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam

¹² Budi Winarto, “Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi”, v. 3, no. 2, 2009, h.127-128.

¹³ <http://www.militanindonesia.org/analisa-perspektif/hukum-demokrasi/8234-demokrasi-borjuismenyengsarakan-kaum-miskin> di akses pada Minggu, 18 Juni 2017 pukul 15.00.

berusaha dan menekan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik, dan negara harus memberi ruang kebebasan bagi warganya untuk berusaha. Inilah cikal bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat. George CC. Lodge, dengan mengutip dari the oxford English dictionary mendefinisikan kapitalisme sebagai: “

Kedua; Korupsi Politik

Sifat korupsi tidak lepas dari sifat ekonomi-politik borjuis-kapitalis. Konsep demokrasi borjuis adalah jalan lebar yang dibuat untuk memuluskan gerak roda ekonomi-politiknya yang eksploitatif dan koruptif. Di dalam negara monarki atau totaliter, korupsi memang menjadi tradisi. Tetapi di dalam negara “demokrasi” borjuis, praktek korupsi memiliki warna lebih buruk lagi. Dalam buku *Corruption, Capitalism and Democracy* yang ditulis oleh John Girling, dikatakan bahwa watak demokrasi liberal (borjuis) telah melahirkan korporasi politik. Politik, yang bermetamorfosis menjadi “perusahaan” milik para pemegang modal. Pembicaraan mengenai politik kemudian menjadi pembicaraan tentang untung rugi dan investasi. Kontes politik di arena pemilu menjadi ajang pertarungan yang berbiaya mahal.

Kelompok yang menang secara moral politik, “sah” untuk mengeruk kekayaan negara guna mengembalikan besaran investasi yang telah ditanamkan plus laba. Akhirnya korupsi menjadi tindakan yang tak terelakkan. Korupsi politik merupakan dampak logis dari demokrasi borjuis.

Demokrasi borjuis adalah demokrasi kepentingan. Partai-partai politik butuh sumber keuangan yang deras untuk sampai pada kepentingan-kepentingan itu. Sumber keuangannya tentu tidak cukup jika hanya mengucur dari iuran anggota dan simpatisannya. Partai-partai elit ini akan berusaha menempatkan orang-orangnya pada lini-lini politik strategis untuk bisa mendapatkan dana melalui kebijakan-kebijakan politiknya yang koruptif. Partai-partai tersebut akan berusaha memasukkan orang-orangnya pada ruang-ruang basah seperti di Badan Anggaran (Banggar) DPR atau di komisi-komisi strategis lainnya.

Dalam sistem politik borjuis, yang hanya mengejar kekuasaan ekonomi dan politik untuk tujuan profit, membangun kader-kader yang loyal dan ideologis bagi partai-partai bukanlah sesuatu yang penting. Karena visi politik mereka bukanlah membangun sistem kehidupan yang adil, membangun peradaban yang luhur, membangun kekuatan revolusioner untuk tujuan kemanusiaan. Pandangan politik mereka tidak sejauh itu. Mereka hanya butuh kekuasaan segera. Mereka butuh memapankan modalnya segera. Mereka akan membayar konstituen politiknya dari hasil korupsi, dari hasil merampok

kekayaan negara, dari hasil merampok uang rakyat (pajak) yang diperuntukan untuk pembangunan kesejahteraan.¹⁴

5. Keadaan Demokrasi Borjuis dalam Kehidupan Negara

Demokrasi Borjuis sebagaimana demokrasi rakyat merupakan kelas, atau bentuk demokrasi yang memuat cara pandang kelas. Demokrasi borjuis didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja, sehingga terjadi ketimpangan sosial di masyarakat.

Demokrasi model ini menyelubungi karakter kelas masyarakat kapitalis. Artinya secara formal, semua orang diakui mempunyai hak yang sama, sedangkan rakyat secara nyata tidak memiliki. Dampaknya, krisis sosial pun makin tajam dan demokrasi borjuis dikecam. Kekuasaan kapital monopoli sangat kuat dan selalu tegar menghadapi tuntutan kelas buruh. Bahkan, hak-hak yang telah diperjuangkan dengan susah payah (misalnya, kenaikan upah minimum) malah diinjak-injak lagi. Dari situasi seperti ini melahirkan sistem kediktatoran (fasis). Namun, hal ini tidak terjadi di negara-negara penganut demokrasi borjuis, karena kelas pekerja dapat mengorganisasi serta mewakili kepentingan mereka.¹⁵

6. Das Sollen atau Hal Seharusnya dari Demokrasi Borjuis

Struktural Transformation mengulas dua tema pokok, yaitu asal mula ruang publik borjuis dan analisis terhadap perubahan struktural ruang publik di zaman modern, lebih tepatnya di abad ke 18 dan 19. Apa yang membuat Habermas tertarik kepada ide tentang ruang publik adalah karena potensinya sebagai fondasi dari masyarakat yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip demokratis.

Secara historis ruang publik muncul pertama kali pada abad ke-17 di Eropa, di mana kemunculannya berbarengan dengan berkembangnya kapitalisme. Pada era proto kapitalisme mulai muncul kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas borjuis. Mulanya mereka hanya melakukan usaha perdagangan biasa lalu lambat laun mereka memulai mode produksi kapitalis. Dengan latar ini, ruang publik yang muncul pada era tersebut dengan demikian merupakan ruang publik borjuis, yaitu ruang publik yang ditempati oleh kelas komersial atau pedagang dan professional.

¹⁴<http://www.militanindonesia.org/analisa-perspektif/huku-demokrasi/8234-demokrasi-borjuismenyengsarakan-kaum-miskin> di akses pada Minggu, 18 Juni 2017, pukul 15.00

¹⁵ NR. Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Dalam jurnal SOSIO DIDAKTIKA, vol. 2., no.2, h.158-159.

Distingsi antara publik dan privat merupakan konstruksi yang melandasi munculnya ruang publik. Kepublikan direpresentasikan oleh negara yang mengatur masyarakat, sedangkan keprivatan direpresentasikan oleh masyarakat sipil yang otonom. Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik. Ruang publik borjuis dengan demikian merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik. Negara diajak berdebat tentang isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat, namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial. Di sini, terdapat dinamika unik yang mementahkan pandangan yang mengontraskan secara keras antara yang publik dengan yang privat. Ruang publik borjuis mampu berfungsi sebagai “mediasi dialektis” antara ranah privat dengan ranah publik.

Sifat kepublikan dalam ruang borjuis ini berbeda dengan kepublikan yang ada pada masa pra-modern di zaman feodalisme. Pada masa feodalisme, raja dan kaum aristokrat menampilkan dan mempresentasikan dirinya di depan publik bukan sebagai undangan untuk berkomunikasi atau berdebat, melainkan semata-mata untuk unjuk kekuatan secara retorik. Ruang publik pada masa feodal ini bukanlah ruang publik yang murni karena telah diimbui dengan intrik pemanggungan dan penataan. Ketika kemudian kelas borjuis mulai meningkat jumlahnya, posisi tawar mereka meningkat. Salah satu aspek sosial terpenting, ekonomi, kini menjadi wilayah pengurusan mereka dan bukan lagi negara atau kerajaan.

Pada mulanya, ruang publik borjuis merupakan ruang publik yang bersifat literer. Ini terkait dengan fakta bahwa keluarga borjuis merupakan konsumen karya sastra sekaligus sumber dari relasi dan peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra tersebut. Karya sastra yang banyak dimuat dalam buku, jurnal dan berkala merupakan cermin di mana kelas borjuis merefleksikan norma-norma kehidupannya dan posisinya di dalam masyarakat.¹⁶

7. Das Sein atau Realita dari Demokrasi Borjuis

Partai Boshelvik atau Bolchinstvo adalah golongan terbesar Rusia yang menyetujui terbentuknya partai perjuangan untuk menentang kekuasaan Tsar. Golongan ini mewakili kaum tertindas dan tersaing dari hidupnya karena adanya penguasaan yang dilakukan oleh negara, tuan tanah (bangsawan) dan kaum borjuis (bangun atas) dari alat produksi yang seharusnya menjadi sumber

¹⁶ Antonius Galih Prasetyo, “Menuju Demokrasi Rasional Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 16, No. 2, November 2012, h. 171-173.

kehidupan bagi kaum petani di Rusia. Revolusi menjadi jalan sebuah pertarungan kekuatan secara terbuka antara kekuatan sosial di dalam perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan.

Rusia adalah bagian dari sejarah perkembangan masyarakat dimana terdapat anatagonisme kelas. Marx mengatakan bahwa sejarah perkembangan manusia adalah "Sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai saat ini merupakan cerita dari perjuangan kelas. Kebebasan dan perbudakan, bangsawan dan kaum jelata, tuan dan pelayan, kepala serikat dan tukang dengan ketalian penekan dan yang ditekan berada pada posisi yang selalu bertentangan satu sama lain dan berlangsung tanpa putus."

Di bawah kekuasaan Tsar, masyarakat hidup di bawah tekanan Tsar maupun tuan tanah. Besarnya dominasi Tsar membuat Rusia tetap mempertahankan masyarakat agrarisnya yang didasarkan pada perbudakan. Terbukti pada abad ke-19, berjuta-juta petani-budak merasa terikat dengan kampung dan mengerjakan ladang tanah milik bangsawan atau negara secara bergantian, mereka bekerja hanya semata-mata meningkatkan hasil padi-padian. Dua dari sepuluh juta keluarga tani di Rusia, 3½ juta rumah tangga adalah petani yang tidak mempunyai alat produksi, mereka menanam hanya sebagian kecil dari tanah mereka, sisanya mereka harus menyerahkan sebagian hasil lagi kepada kaum kulak (petani kaya) dan mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Para kulak, justru sebaliknya, jumlah mereka 1½ juta, tetapi memiliki 50 persen areal tanah.

Mereka yang melakukan pemberontakan, tetapi tetap dapat dibubarkan oleh Tsar. Sebab dalam menjalankan pemerintahannya, Tsar menggunakan cara-cara militer di samping itu juga Tsar tidak hanya memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi Tsar merupakan pemilik negara yang berhak mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia. Hal itu didorong kepercayaan Kristen Ortodoks Rusia yang mengatakan bahwa Tsar adalah utusan Tuhan di muka bumi, maka rakyat diharuskan patuh terhadap perintah Tsar dan rakyat dituntut untuk setia dan menghambakan diri kepada Tsar. Pemerintahan Tsar sangat reaksioner dan bersifat otokrasi.

Feodalisme Rusia mendorong adanya rasa persatuan, rasa kesadaran dari rakyat untuk merubah dan mengganti kekuasaan yang menyengsarakan itu. Berbagai pemberontakan terus dilakukan untuk meruntuhkan sistem feodal, sistem perhambaan ala rusia yang mirip dengan sistem perbudakan tersebut tetapi besarnya kekuasaan Tsar untuk meredam pemberontakan dilakukan dengan berbagai cara. Hingga akhirnya, Tsar Alexander II memaksakan suatu reformasi agraria yang seharusnya menjadi tuntutan kaum borjuis ternyata diambil alih oleh kekaisaran.

Reformasi agraria menyebabkan industrialisasi didorong dari atas oleh kekaisaran. Pada abad ke-20 telah berkembang dimulai pada tahun 1865-1890

mendorong jumlah pekerja di pabrik dan perusahaan kereta api melonjak dari 706.000 orang menjadi 1.433.000 orang, kemudian meningkat pada tahun 1900 naik menjadi 2.792.000. Sehingga kemudian terdapat 269 perusahaan asing yang tersebar di seluruh Rusia yang awalnya hanya terdapat 16 perusahaan saja pada tahun 1863 dan kebanyakan perusahaan dimiliki oleh pihak asing. Sejak kelahiran kaum buruh di Rusia telah terjerumus ke dalam industri-industri termaju dengan konsentrasi kekuatan kaum pemodal dengan kondisi kerja kaum buruh yang menyedihkan, dimana upah buruh laki-laki adalah satu rubel perhari dan untuk buruh perempuan hanya setengah rubel perhari. Hal demikian juga menyebabkan terjadinya pemogokan di kalangan buruh dan dapat dilihat dari perkembangan gerakan buruh di Rusia.

Mereka yang tertindas semakin reaksioner dan kesadaran sosialnya telah terbangun dan semakin matang untuk terus melakukan pemogokan. Oleh karena itu diperlukan Partai untuk membangun dan membimbing para proletar (buruh, tani, kaum tertindas) untuk terus berjuang menentang sistem pemerintahan yang sangat berpihak pada pemilik modal.¹⁷

8. Benturan Das Sein dan Das Sollen dalam Demokrasi Borjuis

Marxisme melihat bahwa negara adalah alat dari kelas yang dominan (berkuasa) untuk menindas kelas-kelas lainnya. Karena itu kemudian dalam negara ada satuan khusus orang-orang bersenjata dan penjara yang gunanya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Negara adalah alat untuk menghisap kelas tertindas, karena itu selazimnya yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi politik. Marxisme membongkar selubung-selubung ideal yang melingkupi konsep negara liberal dan negara versi Hegelian. Seperti halnya filsafat materialisme dialektika historis yang melihat bahwa kenyataan adalah sejarah kontradiksi-kontradiksi material, maka negara menurut Marxisme adalah alat peredam kontradiksi-kontradiksi tersebut (khususnya kontradiksi kelas). Karena negara bukanlah alat perdamaian, maka untuk terciptanya perdamaian negara kemudian akan melenyap sejalan dengan melenyapnya kontradiksi kelas. Ini terjadi setelah melewati fase transisi, yaitu negara sosialisme (kediktatoran proletariat). Masyarakat ketika negara melenyapkannya, maka disebut Marx sebagai masyarakat komunis atau merupakan tahap tertinggi dari tahap-tahap ekonomi (proses produksi) masyarakat. Dalam tahap inilah kehidupan berjalan menjadi "masing-masing memberi menurut kemampuannya, masing-masing menerima menurut kebutuhannya".

¹⁷ Putri Kristinawati, "Peran Partai Boshelvik dalam Revolusi 1917 dibawah Pimpinan Vladimir Lenin" dalam *Jurnal POLITEIA*, vol. 5, no. 2, Juli 2013, h. 87-88.

Proses melenyapkan negara adalah melalui revolusi dengan kekerasan, yaitu kelas buruh menjadi kelas yang berkuasa. Kelas buruh dan kelas tertindas lainnya merebut negara dan mengubah negara borjuis menjadi negara proletariat dengan sistem kediktatoran ploretariat, yaitu proses ekonomi (proses produksi) dan proses politik (sistem pemerintahan) dikuasai oleh kaum buruh bersenjata dan dijaga oleh mereka.¹⁸

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa simpulan diantaranya adalah:

Pertama; Ruang publik borjuis muncul ketika masyarakat sipil (kaum borjuis) mulai melancarkan gugatan terhadap klaim kepublikan negara, yang dirumuskan berupa pertanyaan tentang sudahkah negara melayani kepentingan publik.

Kedua; secara kontekstual kaum buruh yang tertindas oleh kelompok Borjuis menjadi semakin reaksioner dan kesadaran sosialnya telah terbangun serta semakin matang untuk terus melakukan pemogokan. Oleh karena itu, dalam konteks Rusia di era Tsar, kaum buruh memerlukan Partai untuk membangun dan membimbing mereka (kaum buruh, tani, kaum tertindas) untuk terus berjuang menentang sistem pemerintahan yang sangat berpihak pada pemilik modal.

Ketiga; terjadi benturan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*). *Das Sollen* yang menyatakan bahwa Demokrasi Borjuis merupakan fakta kekuasaan yang dimiliki kaum pemilik modal (kaum Borjuis) karena kekuasaan hartanya baik tanah maupun alat-alat industri untuk mempekerjakan kaum buruh. Sedang *Das Sein* menyatakan bahwa kenyataan pahit kedudukan kaum buruh yang berada pada posisi tertindas tidaklah seharusnya terjadi. Karena kondisi ini semakin memperparah nasib kaum buruh dalam kondisi demokrasi borjuis ini.

Keempat; Implikasi yang terjadi dari adanya Demokrasi Borjuis terhadap kehidupan bernegara mengakibatkan adanya benturan antara kaum Borjuis dengan kaum buruh. Dampak itu terlihat di beberapa negara yang melakukan revolusi mengubah tatanan kehidupan negaranya dari pola monarki menjadi pola demokrasi terpimpin (komunis), seperti yang terjadi di Rusia. Selain itu menimbulkan beberapa hal dalam kehidupan bernegara diantaranya adalah; timbulnya kesengsaraan rakyat miskin; dan timbulnya korupsi politik pada kalangan elit.

¹⁸ Harsa Permata, "Filsafat dan Konsep Negara Marxisme" dalam *Jurnal Filsafat* Vol. 21. No. 3, Desember 2011, h. 210-211.

Referensi:

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) h. 40
- Asnawi; dan Hartutik, "Analisis Historis Terhadap Komunis Sebagai Suatu Ideologi Politik", dalam jurnal seuneubok lada, v. 2, no. 1, juli-desember 2014, h. 12
- Dahar KAH, Rustam. "Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam, v.1, Ed. 1, mei, 2010, h. 18
- Harianntati, Runi. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi", dalam jurnal demokrasi, v. II, no. 1, 2003, h. 65-66
- <http://www.militanindonesia.org/analisa-perspektif/huku-demokrasi/8234-demokrasi-borjuismenyengsarakan-kaum-miskin> di akses pada Minggu, 18 Juni 2017, pukul 15.00
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004) h. 70
- Kristinawati, Putri. "Peran Partai Boshelvik dalam Revolusi 1917 dibawah Pimpinan Vladimir Lenin" dalam *Jurnal POLITEIA*, vol. 5, no. 2, Juli 2013, h. 87-88
- Permata, Harsa. "Filsafat dan Konsep Negara Marxisme" dalam *Jurnal Filsafat* Vol. 21. No. 3, Desember 2011, h. 210-211
- Prasetyo, Antonius Galih. "Menuju Demokrasi Rasional Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruang Publik" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 16, No. 2, November 2012, h. 171-173
- Samekto, Adji. "Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi, dan Globalisasi", dalam jurnal dinamika hukum, v. 14., no. 2, mei 2014, h. 302
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pancasila, Dmeokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 66
- Winarto, Budi. "Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi", v. 3, no. 2, 2009, h. 127-128
- Yunus, Nur Rohim. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Dalam jurnal SOSIO DIDAKTIKA, vol. 2., no.2, 158-159